



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke : 18 (delapan belas)
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI
Rapat Dengan : Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)
Hari, Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M., (Ketua Komisi VI DPR RI) dan dilanjutkan oleh Adisatrya Suryo Sulisto (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a : 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2025.
2. Penyampaian Rencana Kerja dan Roadmap Korporasi Tahun 2026.
3. Konsolidasi BUMN Logistik
4. Lain-lain
Hadir : 1. 14 orang dari 46 orang Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Daud Joseph;
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 10.37 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 22 Juni 2026, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ibu Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M., Ketua Komisi VI DPR RI dan dilanjutkan oleh Bapak Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI telah mendengarkan paparan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) mengenai evaluasi kinerja korporasi 2025, profil perusahaan, pelaksanaan penugasan strategis, agenda transformasi bisnis, *roadmap* korporasi 2026, konsolidasi sektor logistik BUMN, serta kebutuhan dukungan kebijakan ke depan.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan layanan pos nasional, distribusi logistik, layanan keuangan, penyaluran bantuan pemerintah, serta penyediaan akses layanan hingga wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui jaringan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) sepakat agar PT Pos Indonesia (Persero) untuk:
 - a. Kembali kepada *core bisnis* logistik dan melaksanakan penugasan strategis yang diberikan kepada PT Pos Indonesia dalam rangka konsolidasi sektor logistik BUMN dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta penciptaan nilai ekonomi yang nyata bagi negara;
 - b. Menjaga kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU), termasuk memastikan keterjangkauan layanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. Mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur PT Pos Indonesia (Persero) sebagai kanal distribusi nasional yang mendukung, penyaluran bantuan pemerintah, distribusi dokumen dan logistik instansi pemerintah, sinergi BUMN, layanan bagi pekerja migran Indonesia, layanan Haji dan Umroh, dukungan logistik kegiatan nasional, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi daerah;
 - d. Mendorong konsolidasi diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional, penguatan integrasi rantai pasok dan multimoda, perluasan pangsa pasar logistik nasional, dan penurunan biaya logistik nasional secara terukur;
 - e. Menyusun langkah percepatan peningkatan kinerja melalui penguatan segmen logistik dan marketplace, peningkatan utilisasi jaringan dan aset, penguatan transformasi digital dan integrasi layanan, kerjasama dengan pelaku bisnis logistik sektor privat/swasta, peningkatan produktivitas SDM, dan pengembangan kemitraan strategis yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan;
 - f. Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala terkait pelaksanaan transformasi dan restrukturisasi bisnis, progres konsolidasi sektor logistik BUMN, pencapaian target peningkatan pendapatan dan efisiensi, serta pelaksanaan penugasan strategis dan penguatan layanan publik.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI memastikan agar BP BUMN dan PT Danantara Asset Management mendukung penuh atas hal-hal tersebut diatas.

4. Komisi VI DPR RI mendukung langkah transformasi dan restrukturisasi bisnis PT Pos Indonesia (Persero) yang diarahkan pada penguatan model bisnis yang berkelanjutan, peningkatan daya saing layanan logistik nasional, penguatan kualitas layanan dan Service Level Agreement (SLA), pengembangan bisnis berbasis solusi dan kebutuhan pelanggan, serta optimalisasi pemanfaatan aset dan jaringan layanan nasional.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Pos Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI secara jelas dan lengkap.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.57 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO),**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

Ttd.

DAUD JOSEPH

**ADISATRYA SURYO SULISTO
A-206**